

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyuluhan Perencanaan Strategik (Strategic Planning System) tidak terlepas dari konsep manajemen strategik yang mengemukakan hubungan antar organisasi dengan lingkungannya baik lingkungan internal maupun eksternal, dimana embrio dari perkembangan konsep manajemen strategik adalah pemikiran tentang perencanaan strategic.

Sistem perencanaan yang efektif dalam perencanaan strategic diperlukan antara lain untuk merespon perubahan lingkungan eksternal dan mengorganisir sumber daya untuk peningkatan kinerja. Inti dari kegiatan perencanaan adalah menyusun program kerja yang jelas dan dapat diimplementasikan untuk menjamin keberlangsungan suatu organisasi dalam lingkungan yang dinamik.

Managemen strategic dalam lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yaitu berupa Rencana Strategis (Renstra) berperan sebagai aktualisasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip PMPKB, dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Sebagaimana dimaklumi bahwa kelembagaan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Walikota Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi sebagai instansi yang diberi wewenang dan bertanggungjawab dalam bidang PMPKB dituntut mempunyai Perencanaan Strategis (Renstra) yang diimplementasikan dalam bentuk visi, misi, tujuan, sasaran serta program yang jelas, terarah dan terpadu yang dapat memenuhi dan mengarahkan partisipasi masyarakat serta yang berkepentingan dalam bidang PMKB.

Memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2002-2005 yang bertujuan memberikan arah, pedoman dan pola kerja bagi seluruh personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi dalam upaya mewujudkan visi, misi dan garis-garis kebijakan yang telah ditetapkan oleh instansi. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2002 – 2005, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya.

Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran dalam mendukung kegiatan yang telah direncanakan terbatasnya alokasi waktu dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk itu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2008-2013 berupaya meminimalisir segala keterbatasan yang ada melalui upaya maksimalisasi dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas bidang PMKB.

Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2009-2013 merupakan hasil karya yang melibatkan semua pihak, untuk itu dalam kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Walikota Sukabumi yang telah memberikan arahan bimbingan dan petunjuk;
2. Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bidang serta Kepala Sub Bagian yang telah memberikan masukan bahan-bahan informasi dan data-data yang diperlukan;
3. Tim Penyusunan Renstra Tahun 2009-2013;
4. Semua pihak yang telah membantu dan partisipasi secara aktif dalam penyusunan Renstra ini.

Mudah-mudahan segala amal baik yang telah diberikan dalam upaya meningkatkan pengawasan di Kota Sukabumi mendapat limpahan rahmat dari Allah SWT.

Sukabumi, 20 Nopember 2009

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi,

Drs. H. A. Hamdan, MM
Pembina Tk. I
Nip. 19581228 197811 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Metode Penyusunan	1
3. Landasan Hukum	2
4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	5
BAB II VISI, MISI DAN NILAI-NILAI INSTANSI	
1. Visi	7
2. Misi	8
3. Nilai-nilai Instansi	10
BAB III LINGKUNGAN STRATEGI DAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN	 13
1. Analisis Lingkungan Internal	13
2. Analisis Lingkungan Eksternal	14
3. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	15
BAB IV TUJUAN, SASARAN DAN CARA MENCAPAI TUJUAN	
1. Tujuan	17
2. Sasaran	18
3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	19
a. Kebijakan	20
b. Program	21
c. Kegiatan	21
BAB V PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk didalamnya kuantitas, kualitas penduduk dan kualitas keluarga serta didukung dengan prasarana penduduk guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Kuantitas penduduk yang besar, kurang selaras dan serasi terlebih lagi tidak seimbang nya daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat mempengaruhi berbagai aspek pembangunan dalam kehidupan masyarakat, di lain pihak jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan salah satu fondasi yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan.

Dengan demikian salah satu faktor yang urgensinya dapat mempengaruhi pencapaian IPM adalah pembangunan penduduk, kualitas keluarga dan pemberdayaan masyarakat, begitu pula mobilitas penduduk difokuskan agar menjadi penduduk yang potensial, tangguh dan mandiri.

Memperhatikan keterkaitan penduduk dengan aspek pembangunan nasional sebagaimana dikemukakan di atas, maka salah satu program yang langsung berhubungan dengan tujuan pencapaian IPM adalah program Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yaitu upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat serta Peningkatan Kesejahteraan (NKKBSS)

Sesuai dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 Lembaran Daerah Nomor 31 Seri D-21 Tanggal 21 November 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi, serta Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 42 Tahun 2004 tanggal 9 Pebruari 2004 Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2004 Seri D-13 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi. Bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi mempunyai tugas pokok melaksanakan

kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pemahaman Otonomi Daerah dibidang PMPKB berdampak pula pada tidak seimbangnya kapasitas yang dimiliki Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi dalam melakukan Pemberdayaan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah otonom, karena perubahan yang drastik tidak segera atau tidak dipersiapkan suatu strategi penguatan dan pemberdayaan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi baik dari aspek kelembagaan atau manajerial, aspek standar, pedoman maupun sumber daya yang memadai.

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Disuatu sisi merupakan salah satu upaya dalam melakukan koreksi atas berbagai kelemahan yang terjadi dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, namun dipihak lain belum menunjukkan suatu perubahan paradigma yang memandang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai salah satu tugas pemerintahan yang seharusnya dipandang sebagai suatu sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu sistem pemberdayaan. Hal ini menjadi penting karena sistem Pemerintahan Daerah menurut asas manajemen harus ditopang oleh sinergiknya fungsi manajemen yang ada. Suatu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah yang tidak ditopang dengan pemberdayaan yang seimbang, maka berdampak akan menjadi kontra produktif bahkan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang justru dapat menghambat akselerasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat didaerah.

Sejalan dengan pelaksanaan tugas yang diemban oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi dalam melaksanakan kewenangan dibidang PMPKB yang mengarah pada penguatan dan pemberdayaan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi perlu adanya perencanaan strategis sebagai suatu proses yang berorientasi pada hal yang ingin dicapai secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sebagai bagian dari manajemen strategis, perencanaan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi Tahun 2009-2013 sebagai suatu pendekatan sistem untuk mengidentifikasi dan membuat perubahan-perubahan yang

diperlukan untuk mengatur kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi yang berisikan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dapat memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi untuk masa lima tahun mendatang.

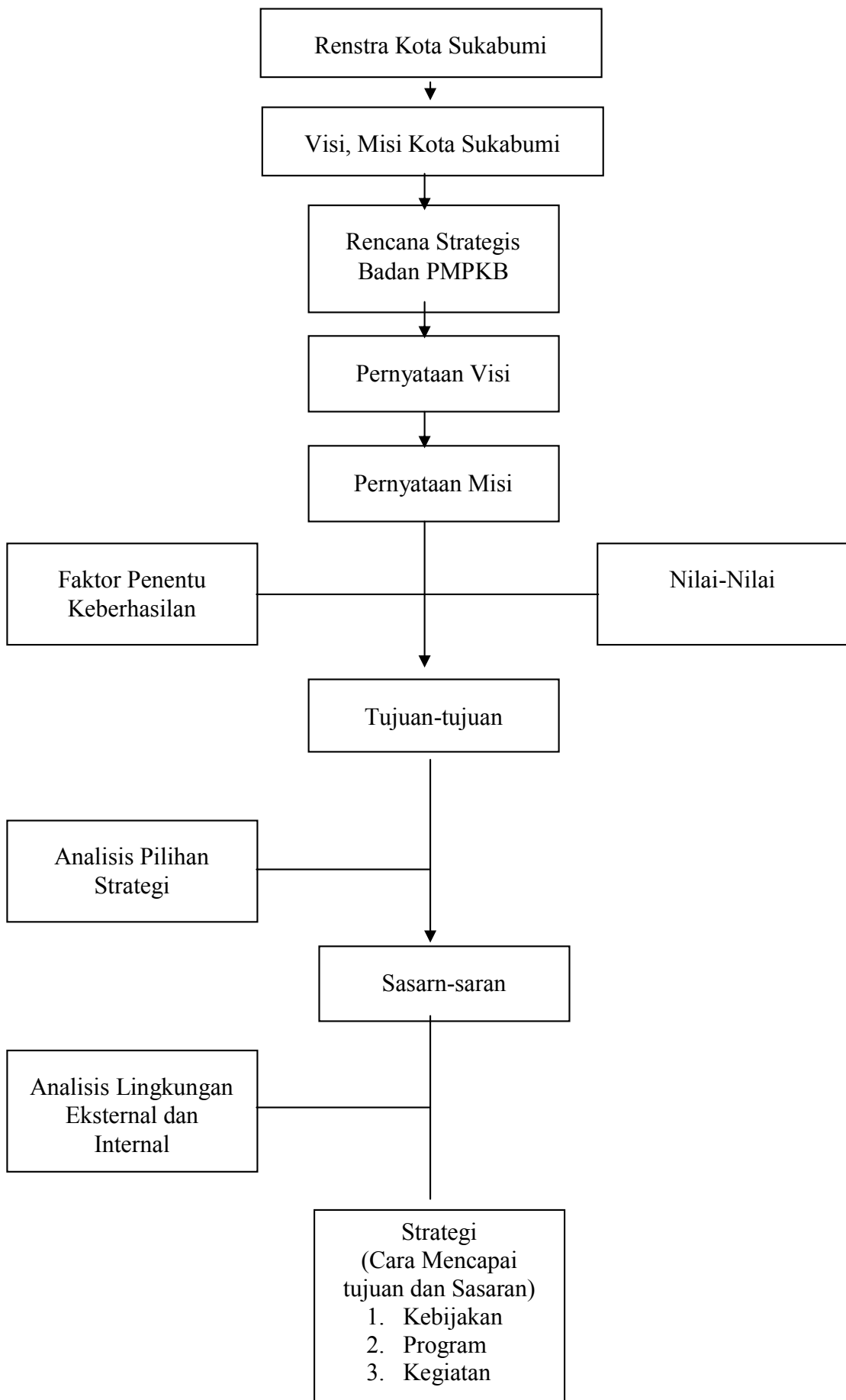
Rencana Strategis ini disusun berdasarkan program yang terencana dan terukur, diharapkan dapat memenuhi kehendak aspirasi serta partisipasi masyarakat (stake holder), juga sejalan dengan visi dan misi Kota Sukabumi sebagai Pusat Pelayanan Jasa Terpadu dibidang Perdagangan, Pendidikan dan Kesehatan.

II. METODE PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis dilaksanakan secara kolektif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh jajaran personalia dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi yang dinilai aktif dan dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Strategis.

Adapun kerangka penyusunan/perumusan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi yang merupakan bagian dari tahapan kegiatan dalam formulasi strategi meliputi tahapan perumusan visi, misi dan nilai analisis lingkungan internal dan eksternal, analisis pilihan strategi dan faktor penentu keberhasilan serta penetapan tujuan, sasaran dan strategi (Kebijakan, Program dan Kegiatan).

Langkah-langkah perumusan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi digambarkan sebagai berikut :



III. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi Tahun 2009 - 2013 adalah :

- a. Tap. MPR No. XI Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- m. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- n. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 59 / IX / 1999 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- o. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi;
- p. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi;

- q. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi.

IV. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi, dalam rangka penguatan dan pemberdayaan kelembagaan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi perlu memperhatikan kewenangan yang dimiliki mencakup Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Pasal 2 (Kedudukan)

Badan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Perempuan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera.

Pasal 3 (Tugas Pokok)

Badan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 4 (Fungsi)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3 keputusan ini, Badan PMPKB mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat, Perempuan keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
- b. Pemberian perizinan/sertifikasi, rujukan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya;
- c. Pembinaan teknis pengendalian pemberdayaan masyarakat, Perempuan keluarga berencana, dan keluarga sejahtera;
- d. Pengelolaan data dan informasi keluarga;
- e. Pembinaan terhadap seluruh perangkat Badan.

BAB II

VISI, MISI DAN NILAI-NILAI INSTANSI

I. VISI

Langkah awal dalam strategy formulation sebagai tahapan dalam perencanaan strategis adalah penetapan visi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan (Future) yang elastis atas cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan motivatif dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. (Dapat mengisyaratkan adanya misi dan tantangan)

Visi menjawab pertanyaan “What do we want to become ?”

Vision statement thinking about “What is our business in the future ?”

A Vision is a statement about the future, spoken or written today, it is process of managing the present from a stretching view of the future.

Pembuatan visi organisasi merupakan sarana untuk :

- a. Mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan tugas pokok;
- b. Memperhatikan frame work hubungan antara organisasi dengan stek holders (Sumber daya manusia organisme, konsumen / citizen, pihak lain yang terkait);
- c. Menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan.

Untuk mampu menjadi gambaran yang ingin diwujudkan suatu organisasi, pernyataan visi perlu diekspresikan dengan baik agar mampu menjadi tema yang mempersatukan semua unit dan organisasi, menjadi media komunikasi dan motivasi semua pihak, serta sebagai sumber kreativitas dan inovasi organisasi.

Atas dasar pengertian sebagaimana tersebut diatas, maka untuk tahun 2009 – 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi mempertahankan visi :

Mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sehat Sejahtera
(NKKBSS)

Penjelasan Visi :

Menjadi lembaga dan aparat yang profesional dan kredibel” Mempunyai makna bahwa organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi diharapkan menjadi lembaga yang berisikan aparat yang profesional yaitu mempunyai knowledge skill, dan Ethic yang memadai melalui pengembangan organisasi dan pendidikan pelatihan yang berkesinambungan untuk menunjang pelaksanaan tugas yang efektif, efisien, kreatif dan inovatif serta antisipatif dalam menghadapi tantangan tugas ke depan” Untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance)” mempunyai makna bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga ketiga dominan Good Governance, khususnya pemerintah (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam melaksanakan tugas pokoknya selalu transparans, akuntabel, efisien, efektif, bertanggungjawab, memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan partisipasi stake holders.

II. MISI

Pernyataan visi yang telah disebutkan sebelumnya, selanjutnya diterjemahkan kedalam guidelines yang lebih pragmatis dan konkrit yang dapat dijadikan acuan pengembangan strategi dan aktivitas dalam organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi dalam bentuk pernyataan misi.

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dimasa datang, hal tersebut mengandung arti bahwa pernyataan misi memperlihatkan tugas utama yang harus dilakukan/diembakan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi, karena misi mewakili alasan dasar untuk berdirinya organisasi yang bersangkutan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka untuk meningkatkan intensitas kegiatan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas kerja dan manajemen di Daerah, maka untuk mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi dijabarkan ke dalam misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta menjelaskan keberadaan

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi untuk melakukan kegiatan Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dan bagaimana cara melakukannya.

Adapun Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pendewasaan usia perkawinan
2. Mengupayakan peran serta masyarakat dalam pengaturan kelahiran
3. Peningkatan kesejahteraan dan Memperkuat Ketahanan keluarga
4. Mendorong kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
5. Meningkatkan status perkembangan keluarga dari swadaya ke swakarya menuju swasembada

Penjelasan Misi :

Misi 1 : Mengandung makna bahwa lembaga Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi berperan aktif dalam memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam rangka kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pendewasaan usia perkawinan untuk mendorong Peningkatan Tingkat Usia Kawin Pertama bagi wanita;

Misi 2 : Mengandung makna bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana berupaya untuk menekan Laju Pertambahan penduduk Kota Sukabumi dengan menggalakkan Program Keluarga Berencana untuk pengaturan kelahiran sehingga dapat mendorong terciptanya Penduduk Tumbuh seimbang;

Misi 3 : Mengandung makna bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana berperan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kesertaan masyarakat dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) sebagai modal usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Juga berupaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga dengan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) dan

Bina Keluarga Lansia (BKL) sebagai wahana untuk mendidik masyarakat yang memiliki Balita, Remaja dan Lansia agar dapat memperlakukan balitanya, Remajanya dan Lansianya sesuai dengan situasi dan kondisi sasaran tersebut;

Misi 4 : Mengandung makna bahwa Badan Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana berperan aktif dalam Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai macam Program Kegiatan : diantaranya melalui Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan melalui kegiatan Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ilmu dan teknologi, Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik, pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Misi 5 : Mengandung makna bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana berperan aktif dalam meningkatkan status perkembangan Kelurahan dari Swadaya ke Swakarya menuju Swasembada melalui program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/Kelurahan dan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan dengan kegiatan : Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat Kelurahan, Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat, Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Desa/ Kelurahan, Pemberian stimulan Pembangunan Desa/ Kelurahan.

1. KREDIBLE

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi harus Kredible dalam mengemban amanat masyarakat yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Eksistensi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi tergantung aparat pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan fungsional pemerintah yang sampai saat ini menjadi sorotan dan perhatian masyarakat oleh karena itu kredibilitas Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi diperhatikan.

2. KEBERSAMAAN

Selanjutnya adanya komitmen diantara para anggota organisasi untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka mencapai Visi dan Misi Organisasi. Ini berarti masing-masing anggota organisasi harus menghindari ego sektoral, mementingkan bagian organisasinya sendiri, dengan kata lain diperlukan adanya kerjasama/kebersamaan yang baik antara bagian organisasi untuk mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Organisasi tidak hanya menuntut kewajiban dari para anggota organisasinya tanpa memikirkan hak mereka.

3. KEBERANIAN

Keberanian adalah (hal dsb) yang cocok dengan keadaan (hal) yang sesungguhnya, sesuatu yang sungguh-sungguh (benar-benar) ada, kelurusan hati, dimana dalam kenyataan sering diimbangi dengan keberanian untuk mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya sebagai bentuk transparansi di masyarakat.

4. KETEGASAN

Ketegasan mengandung arti kejelasan, kepastian atau keterangan yang jelas dimana bila terjadi penyimpangan perlu diambil tindakan untuk menyesuaikan dengan hasil pekerjaan yang menyimpang (namun dalam proses pembinaan lebih menguntungkan apabila dihindari sangsi/hukuman/scorsing).

5. TANGGUNGJAWAB

Tanggungjawab merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi untuk menyakikan adanya harmonisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Dengan demikian semua elemen organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing namun tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan. Setiap elemen organisasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan dan tidak bekerja secara berkotak-kotak.

6. ORGANIZATIONAL

Berperilaku secara organisasional yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi bekerja sama dengan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyelesaikan permasalahan maupun krisis.

7. KEUNGGULAN

Dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi berkeyakinan untuk selalu menjadi yang terbaik.

8. BERETIKA

Menyelenggarakan kegiatan dengan jujur dan tulus, menjamin perlakuan yang adil dan sama terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

BAB III
LINGKUNGAN STRATEGIS DAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU
KEBERHASILAN

I. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

Lingkungan Internal mencakup struktur organisasi, komunikasi antar bagian dalam organisasi dan sumber daya yang semuanya akan mendukung kelangsungan hidup organisasi.

Dengan melakukan analisa lingkungan internal melalui penerapan metoda analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats), akan membantu organisasi untuk mengoptimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan secara internal, kekuatan dan kelemahan tersebut akan dijadikan alat untuk meraih peluang serta menghindari ancaman.

Pemahaman lingkungan internal akan memberikan pemahaman kepada organisasi akan kondisi dan kemampuan organisasi, dimana lingkungan internal ini sangat mempengaruhi keberhasilan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi dan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

A. Kekuatan (Strengths)

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan strategic dalam mencapai visi dan misi.

Adapun kekuatan yang dimiliki Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi sebagai berikut :

1. Adanya kewenangan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai Peraturan Perundang-undangan antara lain :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan , Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi.
 - c. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi.

2. Tersedianya Pedoman Operasional bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya
3. Adanya motivasi aparat dan adanya kewenangan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi dalam melaksanakan Program-program kegiatan sesuai Tupoksi.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negative, yang menghambat organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi.

Adapun kelemahan yang ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi yang menghambat dalam pencapaian tujuan organisasi adalah :

1. Kurangnya kualifikasi pegawai (SDM) yang kompeten dalam bidang Komputerisasi dan IT
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan Operasional di lapangan
3. Terbatasnya tenaga, baik dilapangan (UPT dan PLKB) maupun di Sekretariat
4. Terbatasnya alokasi dana dalam mendukung berbagai kegiatan baik di Sekretariat maupun operasional dilapangan
5. Belum dipahaminya sistem Mekanisme Operasional oleh sebagian Petugas Lapangan .

II. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

Analisis lingkungan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (Critical Success Factors) bagi suatu organisasi dengan mengetahui kondisi eksternal organisasi akan dapat diketahui peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis lingkungan eksternal diperlukan untuk meningkatkan peran organisasi dalam merespon setiap perubahan yang terjadi.

Lingkungan eksternal meliputi situasi dan kondisi disekeliling organisasi yang berpengaruh pada kehidupan organisasi. Pemahaman pada lingkungan eksternal

akan memberikan masukan pemahaman pada organisasi mengenai kondisi dan situasi organisasi.

A. PELUANG (OPPORTUNITIES)

Peluang adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi.

Peluang yang dimiliki adanya kewenangan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi adalah :

1. Adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Badan yang menangani Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi;
2. Adanya lembaga diluar diluar Badan Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi yang dapat bersinergi dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ;
3. Adanya dukungan kebijakan dalam bidang Operasionalisasi Program PMPKB dari Walikota Sukabumi;
4. Adanya dukungan masyarakat dalam bidang pengawasan terhadap perbaikan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Perogram di Lapangan.

B. ANCAMAN (THREATS)

Ancaman adalah faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negative, yang dapat mengakibatkan organisasi gagal dalam mencapai visi dan misi.

1. Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat pengawas dan pemerintah daerah pada umumnya;
2. Kualitas hasil Pelayanan terhadap masyarakat yang belum optimal;
3. Pemanfaatan hasil Pendataan Keluarga yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana setiap Tahun belum optimal.

III. FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor yang sangat berperan dalam mencapai

keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi didalarnya sangat bergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah.

Faktor-faktor penentu keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensinya dan kemudian dilanjutkan dengan penentu skala prioritas.

Dengan critical success factors, keberhasilan organisasi akan dicoba untuk dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan. Mengingat pentingnya faktor-faktor penentu keberhasilan. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi telah merumuskan faktor-faktor tersebut melalui tahapan analisis lingkungan, analisis tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Faktor-faktor penentu keberhasilan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi dirumuskan sebagai berikut :

1. Adanya Aparatur yang profesional untuk melakukan pengawasan yang handal sesuai dengan tuntutan masyarakat;
2. Adanya dukungan Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi;
3. Tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai untuk meningkatkan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi;
4. Tersedianya alokasi dana yang memadai untuk mendukung kegiatan/ Operasional dan pengawasan.

BAB . IV
TUJUAN, SASARAN DAN CARA MENCAPAI TUJUAN

I. TUJUAN

Tujuan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi berdasarkan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepedulian dan peranserta masyarakat dalam Pendewasaan Usia Perkawinan, rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan 20 Tahun;
2. Menurunkan Laju Pertambahan Penduduk Alamiah melalui Prevalensi Peserta KB Aktif 77, 67 %
3. Menurunkan Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS. I melalui Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS/ UP2K) sehingga jumlah Keluarga Pra KS dan KS. I : 26, 71 %
4. Meningkatkan Tumbuh kembang Anak melalui pembinaan Keluarga Balita (BKB, BKR, BKL dan BLK)
5. Meningkatkan Peran Perempuan dalam aktifitas pembangunan melalui partisipasi perempuan dalam Pembangunan
6. Mewujudkan Peningkatan Status Kelurahan ke Swasembada melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Potensi/ Pemberdayaan Masyarakat.

II. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kualitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi adalah :

1. Pembinaan Remaja dan Keluarga Remaja untuk meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan para Remaja;
2. Terciptanya penduduk Tumbuh Seimbang melalui Pengaturan Kelahiran dengan Laju Pertambahan Penduduk Alami yang terkendali;
3. Meningkatkan Pendapatan Keluarga dengan kelompok UPPKS, UP2K dll.

4. Pembinaan Keluarga Balita, Remaja dan Lansia
5. Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan
6. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Potensi / Pemberdayaan Masyarakat.

III. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Adalah faktor penting dalam proses perencanaan strategis cara pencapaian tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Pencapaian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan penetapan strategi untuk pencapaiannya. Strategi yang dibangun ini dilandasi pada informasi dan data-data yang diperoleh dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana akan dikemukakan berikut :

a. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Elemen-elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dapat dilaksanakan tidak hanya baik secara teori.

Serangkaian kebijakan ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi seluruh staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi untuk melangkah.

Kebijakan yang ditetapkan berkaitan dengan arah, ruang lingkup dan sasaran serta penetapan penggunaan sumber daya yang ada. Kebijakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi sesuai dengan kewenangan yang ada. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut meliputi :

1. Menyelenggarakan pengembangan keluarga berkualitas
2. Menyelenggarakan pengendalian kuantitas penduduk secara alamiah.
3. Menyelenggarakan pengembangan produktifitas keluarga
4. Mendorong dan membantu keluarga pra KS melalui pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana
5. meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.

6. mendorong peranan keluarga dalam memahami dan melaksanakan fungsi-fungsi keluarga
7. membantu memfasilitasi perkembangan kelurahan

b. PROGRAM

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, serangkaian kegiatan telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Program-program yang akan dilakukan dimasa mendatang merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai rencana aksi suatu program yang telah ditetapkan, mungkin saja akan mencapai beberapa sasaran, sebaliknya beberapa program harus dilakukan untuk mencapai suatu sasaran.

Program yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- A. Peningkatan Program Keluarga Berencana
- B. Peningkatan Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- C. Peningkatan Program Pelayanan Kontrasepsi
- D. Peningkatan Program Pembinaan peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KS yang mandiri;
- E. Peningkatan Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak
- F. Peningkatan Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
- G. Peningkatan Program penanggulangan narkoba, PMS.
- H. Peningkatan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- I. Peningkatan Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- J. Peningkatan Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga balita
- K. Peningkatan Program Pengembangan model opsional BKB-Posyandu-Padu;
- L. Peningkatan Perogram keserasian kebijakan peningkatn kualitas anak dan perempuan;
- M. Peningkatan Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- N. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;

- O. Program Peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
- P. Peningkatan Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender atau anak;
- Q. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;
- R. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa ;
- S. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan;

c. KEGIATAN

Kegiatan Instansi Pemerintah merupakan penjabaran program kerja yang telah dibuat oleh organisasi atau dengan kata lain program kerja merupakan kumpulan dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan tersebut berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Kegiatan yang dilakukan secara tahunan menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki Program Kerja Instansi yang berdimensi 5 (lima) tahun. Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari program kerja tersebut diatas adalah sebagai berikut ;

- A. Peningkatan Program Keluarga Berencana
 - 1. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin;
 - 2. Pelayanan KIE
 - 3. Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu
 - 4. Promosi pelayanan KHIBA
 - 5. Pembinaan Keluarga Berencana
 - 6. Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling.
- B. Peningkatan Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - 1. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)
 - 2. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
- C. Peningkatan Program Pelayanan Kontrasepsi
 - 1. Pelayanan konseling KB
 - 2. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
 - 3. Pengadaan alat kontrasepsi
 - 4. Pelayanan KB medis operasi
- D. Peningkatan Program Pembinaan peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KS yang mandiri;
 - Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB;
- E. Peningkatan Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui :

- Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
- F. Peningkatan Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR;
1. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
 2. Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
- G. Peningkatan Program penanggulangan narkoba, PMS :
Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah
- H. Peningkatan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1. Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
 2. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan/kelurahan.
- I. Peningkatan Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
- J. Peningkatan Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga balita;
Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan;
- K. Peningkatan Program Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-Padu;
Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU;
- L. Peningkatan Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
1. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu dan teknologi
 2. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
 3. pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- M. Peningkatan Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
1. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
 2. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

3. Pemetaan potensi organisasi dalam lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak.
 4. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
 5. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
 6. peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
 7. Evaluasi pelaksanaan PUG
 8. Pengembangan sistem informasi gender dan anak
- N. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
1. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendamping korban KDRT;
 2. Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
 3. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
 4. Perumusan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat
 5. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.
- O. Program Peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
1. Pembinaan organisasi perempuan
 2. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peranserta dan kesetaraan gender.
 3. Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.
 4. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.
 5. Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan.
- P. Peningkatan Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender atau anak;
1. Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
 2. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
- Q. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;
1. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
 2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat

- R. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
 - 1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
 - 2. Pemberian stimulan pembangunan desa
- S. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan;
Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif.

BAB V

PENUTUP

Konsep Pemikiran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi yang dituangkan dalam RENSTRA yang didalamnya termaktub Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan membutuhkan suatu kesadaran dan keberanian untuk meraih perubahan sesuai dengan tuntutan zaman yang berkembang dimana masyarakat menginginkan adanya perubahan bahwa Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana bukan sekedar alat pemerintah namun berdiri pada porsinya untuk menjadi kredibel dan mengedepankan profesional.

Dengan disusunnya Perencanaan Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi diharapkan dapat memberikan arahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi untuk mengembangkan dan mengukur terhadap tingkat keberhasilan dalam mencapai visi yaitu :

1. **Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pendewasaan usia perkawinan.**
2. **Mengupayakan peran serta masyarakat dalam pengaturan kelahiran**
3. **Peningkatan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan keluarga**
4. **Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan**
5. **Meningkatkan statusperkembangan kelurahan dari swadaya ke swakarya menuju swasembada.**

Namun kesemuanya itu tergantung kepada kesungguhan kita masing-masing baik sebagai pribadi, masyarakat maupun bangsa, apakah dengan adanya gelombang ini kita akan jatuh terpuruk untuk tidak bangun lagi, atau ia akan berdiri tegar bagai karang di samudera sambil tetap waspada, selalu berfikir jernih dan tetap optimis menatap masa depan yang gemilang dan harapan yang paling dalam adalah Perencanaan Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi ini dapat memberikan arah dalam pelaksanaan program kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi dapat berjalan efektif dan efisien dalam pelaksanaannya terhadap strategi yang akan ditempuh dan akan dilakukan evaluasi dengan demikian tidak menutup kemungkinan adanya koreksi, penyempurnaan, penyesuaian dan lain sebagainya dikemudian hari sesuai dengan yang diharapkan.

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2009 – 2013

Instansi : Badan PMPKB Kota Sukabumi

Visi : Mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sehat Sejahtera (NKKBSS)

Misi : 1 Meningkatkan Kepedulian dan Peranserta Masyarakat, Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Potensi / Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jumlah PKK Aktif 64,76 % ○ Posyandu Aktif 92 % ○ Swadaya Murni Masyarakat 55 % 	Membantu memfasilitasi perkembangan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keberdayaan masyarakat Kelurahan / Kecamatan 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan 3. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan/Kelurahan 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 	
2. Meningkatkan Usia Perkawinan Pertama dan Menurunkan Laju Pertambahan Penduduk Alamiah	Terciptanya Penduduk Tumbuh Seimbang Melalui Pengaturan Kelahiran dengan Laju Pertumbuhan Penduduk Alami yang terkendali	Usia Rata-rata Nikah Pertama 22 Tahun	Pengendalian Kualitas dan Kuantitas Penduduk secara Alamiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. KRR 2. Pengembangan Pusat Pelayanan 3. Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 	

		Prevalensi Peserta KB Aktif 78,17 %	Pengendalian Kualitas dan Kuantitas Penduduk secara Alamiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Keluarga Berencana 2. Program Pelayanan Kontrasepsi 3. Pembinaan Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri 4. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Pembinaan Posyandu 	
		Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I 25,92 %	Mendorong dan membantu Keluarga Prasejahtera dan KS. I alasan Ekonomi Melalui Aktifitas UPPKS dan UP2K	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan/ Kecamatan 	

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2009 – 2013

Instansi : Badan PMPKB Kota Sukabumi

Visi : Mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sehat Sejahtera (NKKBSS)

Misi : 2. Mendorong Pengarusutamaan Gender dan Ketahanan Keluarga

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
3. Meningkatkan Peran Perempuan dalam aktifitas Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah 17 % - Partisipasi angkatan kerja Perempuan 16,8 % - Angka Melekat Hurup Perempuan Usia 15 Tahun keatas 97,25 % 	Meningkatnya pemahaman dan Implementasi Gender dalam aspek Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3. Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan 4. Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 	
			Mendorong Peran Keluarga dalam memahami dan melaksanakan Fungsi-fungsi Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Tenaga Pendamping / Kader Kelompok Bina Keluarga 2. Pengembangan bahan Informasi Tentang Pengasuhan & Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 3. Pengembangan Model Operasional BKB yang menangani pendidikan anak usia dini di posyandu. 	

INDIKATOR CAPAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (BPMPKB)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2009 - 2013

VISI	MISI	TUJUAN	Cara Mencapai Tujuan			Tahun Pelaksanaan							Strategi Pencapaian	
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Exct	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terwujudnya Norma Keluarga Kecil Bahagia Sehat Sejahtera (NKKBSS)	Meningkatkan Kepedulian dan Peran serta Masyarakat, Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran	1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Potensi Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Partisi- pasi masyarakat dalam Pembangunan	- Swadaya Murni Masyarakat 55%	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat dibanding dengan dana bantuan Pembangunan dari Pemerintah	48%	48.35	50%	52%	53%	54%	55%	Membantu memfasilitasi perkembangan Kelurahan	1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan/ Kecamatan 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan 3. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan/ Kelurahan 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 5. Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/Kelurahan
				- Jumlah PKK Aktif, 64,76%	Jumlah PKK Aktif dibanding dengan Jumlah PKK x 100%	60.81	62.12	62.62	63.13	63.63	64.23	64.76		
				- Posyandu Aktif '92%	Jumlah Posyandu aktif dibanding dengan jumlah Posyandu x 100%	86.15	87.33	88	89	90	91	92		

VISI	MISI	TUJUAN	Cara Mencapai Tujuan			Tahun Pelaksanaan							Strategi Pencapaian	
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Exct	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2. Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah - Angka Melek huruf usia 15 tahun keatas - Partisipasi angkatan kerja Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> Pegawai Perempuan di Pemerintahan Daerah dibandingkan jumlah Pegawai Pemerintah Daerah Jumlah anak Perempuan Usia 15 Tahun yang melek huruf dibandingkan anak-anak perempuan usia 15 tahun Jumlah Partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan jumlah angkatan kerja perempuan 	10%	15%	16.3%	16.5%	16.7%	16.9%	17.0%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender 2. Mendorong Peranan Keluarga dalam memahami dan melaksanakan Fungsi-fungsi Keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan 2. Penguatan Kelembagaan Pengurusan Gender dan Anak 3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 4. Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 5. Penguatan Kelembagaan Pengurusan Gender atau Anak

VISI	MISI	TUJUAN	Cara Mencapai Tujuan			Tahun Pelaksanaan							Strategi Pencapaian	
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Exct	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3. Meningkatkan Usia Perkawinan pertama dan menurunkan laju Pertambahan Penduduk Alamiah	Terciptanya Penduduk Tumbuh seimbang melalui Pengaturan Kelahiran dengan Laju Pertumbuhan Penduduk Alami yang terkendali	- Prevalensi Peserta KB Aktif - Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I	Jumlah peserta Program KB aktif per Jumlah PUS x 100% Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan dan sejahtera I PerJumlah Keluarga x 100%	76.79	77.32	77.67	77.84	77.97	78.02	78.17	1. Melaksanakan Pendataan Keluarga 2. Menyelenggarakan Pengembangan Keluarga Berkualitas 3. Menyelenggarakan Pengendalian Kuantitas Penduduk secara alamiah. 4. Menyelenggarakan Pengembangan Produktifitas Keluarga 5. Mendorong dan Membantu Keluarga Pra Sejahtera dan KS. I Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	1. KRR 2. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 3. Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 4. Program Keluarga Berencana 5. Program Pelayanan Kontrasepsi 6. Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri 7. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Pembinaan Posyandu 8. Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 9. Pengembangan Bahan Informasi Tentang pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 10. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga